

Fenomena *Cyber Homeless* Di Jepang

Indun Roosiani, Mutia Zahra Nabila
Universitas Darma Persada
iroosiani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kondisi perekonomian yang tidak stabil telah memunculkan fenomena *cyber homeless*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni dengan mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat dalam suatu fenomena yang dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya (Suryana, 2010:20). Fenomena *freeters*, *parasite single* maupun *cyber homeless* merupakan masalah sosial yang turut menyertai dinamika lajunya perekonomian Jepang. Ketidakstabilan perekonomian Jepang juga berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat Jepang. Ketika terjadi gelembung ekonomi banyak kaum muda Jepang yang dimanjakan oleh kondisi ekonomi yang stabil, dimana pada masa ini banyak bermunculan *parasite single*, yakni sekelompok kaum muda yang mapan secara ekonomi namun menggantungkan hidup kesehariannya kepada orang tua mereka. Ketika Jepang berada pada masa stagnasi perekonomian, sebagai dampak dari krisis minyak, pecahnya gelembung ekonomi dan sistem ketenagakerjaan yang masih berdasarkan senioritas, maka masalah *freeters*, *cyber homeless* mulai bermunculan. Kelompok *cyber homeless* dan *freeters* adalah orang-orang yang terpinggirkan karena sistem pengelolaan manajemen perusahaan yang terpaksa memberlakukan sistem yang berbeda, sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tidak stabil.

Kata Kunci: *Cyber Homeless*, *freeters*, *parasite single*, *bubble economy*, perekonomian Jepang

I. PENDAHULUAN

Dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat selalu ada kesenjangan yang membedakan antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini ditentukan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh atau income perkapita negara. Demikian pula dengan yang terjadi di Jepang. Sebagai salah satu negara maju dalam bidang teknologi, maka kemajuan dalam hal perekonomian pun tidak dapat dipungkiri. Hal ini membawa dampak bagi perubahan kehidupan masyarakat Jepang.

Pada saat Jepang mengalami kemajuan ekonomi yang disebut *dengan booming economy*, maka pada masa itu tingkat perekonomian Jepang mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga (*household consumption*), tingginya laba sektor swasta, semakin banyaknya tenaga terdidik dan terampil (*educated and skilled labour*), stabilnya politik dalam negeri, meningkatnya investasi di sektor industri serta semakin besarnya peran teknologi dan inovasi dalam perekonomian.

Akan tetapi capaian-capaian tersebut menjadikan aktivitas ekonomi kurang terkontrol, sehingga pada tahun 1989 Jepang memasuki fase gelembung ekonomi (*bubble economy*), dimana harga properti meningkat terlalu tajam dan diikuti harga saham yang meningkat

terlalu tinggi, serta pembangunan infrastruktur pedesaan yang sangat masif. Karena anggaran yang digunakan terlalu besar dan tanpa prinsip kehati-hatian, maka terjadilah apa yang disebut dengan *bubble economy* (Statistic Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistical Handbook of Japan, 2016).

Pada periode awal tahun 1990 an dan awal 2000 an, Jepang mengalami stagnasi perekonomian akibat sistem keuangan yang tidak stabil serta buruknya kredibilitas sektor perbankan yang memicu terjadinya gelembung ekonomi. Hal ini ditandai dengan melonjaknya kredit macet perbankan (*non-performing loan*) di sektor properti dan merosotnya nilai saham hingga 50% di Tokyo Stock Exchange. Selain itu banyak perusahaan Jepang yang mengalami penurunan kapasitas produksi, peningkatan jumlah hutang dan kelebihan jumlah tenaga kerja. Pecahnya gelembung ekonomi (*bubble burst*) membawa perekonomian Jepang masuk ke dalam resesi yang berkepanjangan, yang membawa Jepang terperangkap dalam kesenjangan ekonomi. Kehidupan masyarakat Jepang berada dalam situasi yang sulit, dimana persebaran pendapatan yang diperoleh menjadi tidak merata sehingga memunculkan masalah tunawisma, pengangguran dan fenomena *cyber homeless*.

Kondisi yang dialami Jepang saat itu, persis dengan apa yang diungkapkan oleh (2013) mengatakan bahwa kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan.

Menurut Rober Chambers (dalam Fletcher, 2013), pengertian kesenjangan sosial ekonomi merupakan gejala yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan yang lainnya di antara masyarakat yang hidup di sebuah wilayah tertentu. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial adalah adanya Kebijakan Pemerintah. Kesenjangan sosial yang terlalu besar dapat memicu timbulnya kemiskinan dan pengangguran.

Kondisi yang digambarkan oleh Fletcher dan Rober Chambers di atas terjadi pada kehidupan bangsa Jepang, dimana pasca meletusnya gelembung ekonomi Jepang berada dalam kesenjangan sosial yang ditandai dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika masyarakat miskin dan menganggur mendominasi di suatu negara, maka pendapatan mereka juga sangat rendah. Dengan pendapatan yang tidak pasti dan cenderung sangat rendah membuat daya beli masyarakat

terhadap kebutuhan sekunder akan menurun. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan keuntungan perusahaan tidak optimal.

Keadaan ini semakin memburuk dengan adanya krisis ekonomi di kawasan Asia pada tahun 1997-1998. Dapat dikatakan dekade tahun 1990 an merupakan era gelap perekonomian Jepang atau disebut sebagai dekade yang hilang (*the lost decade*) (International Monetary Fund, *The Japanese Banking Crisis of the 1990s: Sources and Lessons*, IMF Working Paper WP/00/7 January 2000).

Pada tahun 2000an, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan perekonomian, di antaranya adalah mengurangi kredit macet, mengurangi defisit anggaran serta melakukan privatisasi perusahaan negara. Namun, ketika pada tahun 2008 terjadi bangkrutnya perusahaan sekuritas Lehman Brothers, maka hal ini juga berdampak pada lambatnya proses pemulihan ekonomi Jepang. Kondisi ini diperburuk lagi dengan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di pantai timur laut Jepang pada tahun 2011 yang disertai dengan bocornya instalasi nuklir.

Kondisi perekonomian Jepang yang tidak stabil di tahun 1990an hingga tahun 2000an mempengaruhi terjadinya perubahan pola hidup masyarakatnya, termasuk di dalamnya adalah mulai munculnya para *cyber homeless*. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu bersaing dengan kondisi perekonomian dan tidak stabil dalam segi pendapatan. Keberadaan *cyber homeless* menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Jepang. Namun, keadaan ini justru dimanfaatkan oleh orang lain dengan menciptakan fasilitas yang nyaman dan menyediakan berbagai kebutuhan bagi *cyber homeless*, sehingga hal ini menjadi peluang bisnis tersendiri bagi pemilik usaha internet.

Cyber homeless adalah sebutan untuk orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyewa tempat tinggal, sehingga mereka tidak memiliki alamat tetap. Selain itu, mereka juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau bekerja namun dengan upah yang rendah. Para *cyber homeless* memanfaatkan cafe internet untuk mengisi waktu luang atau menghabiskan waktu mereka sepanjang hari. Awalnya mereka hanya ingin menghabiskan waktu beberapa jam saja, namun lambat laun karena secara ekonomi tidak mampu membayar sewa apartemen, akhirnya cafe internet menjadi pilihan untuk tempat tinggal mereka.

Jika kita melihat Jepang dalam beberapa dekade terakhir, keberadaan tempat publik baru sebagai ruang sosial dan interaksi budaya telah menjelaskan proses identifikasi diri. Orang-orang mengasosiasikan diri mereka sendiri dengan tempat dan bentuk hubungan sosial yang sudah mengalami perubahan. Ruang publik telah berubah menjadi ruang privat yang dapat

menyembunyikan identitas mereka. Munculnya fenomena *cyber homeless* menjelaskan keberadaan ruang publik yang telah berubah fungsi menjadi ruang pribadi bagi sebagian masyarakat Jepang (Kilina, 2012:6).

Munculnya internet kafe bagi para homeless telah menjadi oase tersendiri bagi para pekerja yang tidak mampu menyewa kamar atau apartemen. Keberadaan *cyberhomeless* yang menempati ruang-ruang internet telah memengaruhi budaya dan kehidupan sosial masyarakat perkotaan Tokyo, dimana proses migrasi internal di sekitar tempat-tempat umum telah mengubah ruang publik menjadi ruang pribadi (Kilina, 2012:7)

Cafe internet pada awalnya hanya menyediakan layanan internet, namun pemiliknya kemudian memperluas layanan dengan menjual makanan, minuman, pakaian hingga ke kamar mandi gratis. Pengelola cafe internet adakalanya juga memanfaatkan orang-orang yang tertinggal kereta terakhir, sehingga mereka dapat singgah untuk menunggu kereta keesokan harinya.

Menurut survey dari Pemerintah Jepang, lebih dari 5400 orang menghabiskan setengah minggu dari waktunya di cafe internet. Munculnya para *cyber homeless* ini menjadi fenomena pada masyarakat Jepang tentang adanya kesenjangan kekayaan yang semakin meningkat. Para *cyber homeless* ini memanfaatkan cafe internet karena harga sewa yang ditawarkan relatif lebih murah, dan menjadi pilihan terbaik daripada mereka harus tidur di jalanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat masalah pada ketidakstabilan perekonomian di Jepang yang memicu timbulnya masalah sosial, perubahan gaya hidup dan munculnya *cyber homeless* sebagai pilihan gaya hidup.

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kondisi perekonomian yang tidak stabil telah memunculkan berbagai dampak dan perubahan pada masyarakat Jepang, diantaranya adalah timbulnya berbagai masalah sosial, perubahan gaya hidup dan maraknya fenomena *cyber homeless*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni dengan mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat dalam suatu fenomena yang dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya (Suryana, 2010:20).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni dengan mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat dalam suatu fenomena yang dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya (Suryana, 2010:20).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Perekonomian Jepang Tahun 1980 – 2000 an

Ketika gelembung ekonomi pecah pada tahun 1990 an, banyak ahli ekonomi dunia menilai bahwa sistem tenaga kerja Jepang akan mengalami perubahan besar. Sampai akhir tahun 1980 an, banyak artikel yang mengulas tentang kehebatan lingkungan kerja perusahaan Jepang. Pada saat kondisi industri internasional harus berjuang dari pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingginya angka pengangguran, justru Jepang sedang menikmati pertumbuhan ekonomi yang spektakuler dan rendahnya angka pengangguran.

Ada sebuah persepsi yang menandai bahwa sumber dari kekuatan pengembangan skill para pekerja dan tingginya angka produktivitas perusahaan adalah karena adanya sistem pekerjaan seumur hidup (*long lifetime employment*) dan pemberian gaji berdasarkan senioritas dan loyalitas terhadap perusahaan.

Namun segalanya berubah pada tahun 1990 an. Perekonomian Jepang dibenturkan pada tantangan globalisasi dan tingginya beban hutang perusahaan. Sebagian besar perusahaan Jepang tidak mampu mempertahankan fleksibilitas dengan mengambil keputusan dan tindakan yang cepat dan tepat, sehingga akhirnya banyak yang mengalami kondisi stagnasi. Sistem pekerjaan seumur hidup dan penggajian berdasarkan senioritas kini dianggap praktik yang tidak lagi sesuai dengan kondisi perusahaan, karena hal ini tidak mampu memperbaiki kondisi yang sedang terjadi. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan yang ditempuh perusahaan Jepang supaya tidak tertinggal jauh dengan negara lain diantaranya mengurangi jumlah karyawan tetap secara besar-besaran, dan menggantikannya dengan karyawan kontrak yang dapat diberhentikan setiap saat. Secara perlahan-lahan perusahaan mulai menerapkan sistem penggajian berdasarkan kinerja dan efektifitas kerja.

Bagaimanapun juga, pada tahun 1990an Jepang telah kehilangan kepercayaan diri dan tidak jelas ke mana arah perekonomiannya. Ketika ekonomi Jepang mengalami stagnasi, media Jepang mengangkat masalah ini dalam “1990s as the lost decade”. Masyarakat Jepang merasakan dampaknya dalam sisi pendapatan ekonomi dan menurunnya tingkat kesejahteraan hidup. Perusahaan dan masyarakat Jepang dihadapkan pada situasi perekonomian dunia dan harus menghadapi kenyataan buruk yang dibenturkan dengan image “perfecting the Japanese style employment system”. Sebagian besar masyarakat Jepang mengalami kebingungan dengan kondisi perekonomian seperti ini, dan harus mencari jalan keluar dari keterpurukan ekonomi ini. Di antara kelompok masyarakat Jepang yang langsung merasakan efek situasi ini adalah kaum muda Jepang. Selain itu Jepang berada di

tengah krisis yang berkaitan dengan pekerjaan yang berasal dari resesi tahun 1980an. Sejak tahun 1984, telah terjadi penurunan yang stabil dari pekerja reguler dan penuh waktu dan peningkatan pekerja paruh waktu yang tidak teratur. Menurut sebuah survei oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri tahun 2011, 35% angkatan kerja Jepang adalah pegawai yang tidak beraturan. Kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah gaji rata-rata bulanan untuk pekerja yang tinggal di Tokyo adalah 113.000 yen (\$ 1,443), yang berada di bawah garis kemiskinan 1,12 juta (\$ 14.300) yang ditetapkan oleh pemerintah. Apartemen satu kamar tidur murah di Tokyo bisa menghabiskan biaya 74.200 yen (\$ 667,47) tanpa utilitas dan biaya hidup lainnya. Banyak pekerja tunawisma yang merasa putus asa memilih cafe internet untuk berlindung dan tidur malam.

2.2 Kondisi Lapangan Pekerjaan dan Fenomena *Cyber Homeless* di Jepang

ネットカフェ難民, yang juga dikenal sebagai *cyber homeless* (サイバーホームレス) adalah kelas orang tunawisma di Jepang yang tidak memiliki atau menyewa tempat tinggal (tidak memiliki alamat tetap) dan tidur di kafe internet 24 jam atau kafe manga. Kafe ini pada awalnya hanya menyediakan layanan internet, namun lambat laun pemilik kafe menyediakan fasilitas makanan, minuman bahkan tempat mandi. Kafe ini sering digunakan oleh orang-orang yang ketinggalan kereta terakhir, namun kecenderungan yang terjadi kini adalah sebagian besar dari mereka memanfaatkannya sebagai tempat tinggal. Sebuah studi dari pemerintah Jepang menyebutkan bahwa 5.400 orang telah menghabiskan setengah minggu di kafe ini.

Jika kita melihat data resmi tentang pekerjaan dan pengangguran di Jepang, maka kinerja pasar tenaga kerja bergerak cukup signifikan. Pada akhir tahun 1960an, tingkat pengangguran resmi rata-rata 1,1% Bahkan setelah krisis minyak dimana negara-negara yang tergabung dalam OPEC melakukan embargo minyak pada tahun 1973, tingkat pengangguran di Jepang tidak lebih dari 2,5%. Baru setelah beberapa tahun setelah embargo minyak tersebut, pengangguran mulai meningkat (Taira, 1983:3).

Selama tahun 1950 an tingkat pengangguran resmi naik sedikit di atas 2%. Namun pada hakekatnya, angka ini masih dapat dikatakan relatif rendah, karena berkat adanya kenaikan pendapatan individu dan kemajuan dalam asuransi sosial. Kebijakan pemerintahan Jepang tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemerintah masih tetap memberikan subsidi kepada para pekerja yang diberhentikan akibat krisis minyak tahun 1973 dengan tujuan untuk mengurangi citra negatif “pengangguran”.

Sejak perekonomian Jepang menurun, telah terjadi fenomena orang yang tinggal di kafe lebih dari satu minggu. Awalnya cafe internet hanya digunakan orang untuk menghabiskan waktu, namun lambat laun menjadi tempat penampungan bagi ‘tunawisma sementara’ Jepang. Pemilik cafe internet kemudian mengubah tempat ini menjadi lebih nyaman dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan bagi para penggunanya. Jenis pengunjung yang datang ke kafe ini terdiri dari turis, pelancong atau *backpacker*. Selain itu ada juga beberapa yang tertinggal kereta terakhir dan memanfaatkan cafe internet untuk bermalam. Ada juga salariman yang pekerjaannya jauh dari rumah, sehingga mereka lebih suka tinggal di cafe internet dari 1 bulan hingga 2-3 tahun.

Menurut suvey dari Pemerintah Jepang, mereka yang tidak tertarik dengan internet atau *manga*, telah memanfaatkan kafe ini sebagai tempat tinggal dengan alasan sewa yang murah, bila dibandingkan dengan sewa apartemen, hotel kapsul dan sebagainya. Diperkirakan setengah dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau mereka yang bekerja tidak tetap menyewa kafe ini dengan biaya 100.000 yen/bulan, lebih rendah dari biaya yang dibutuhkan untuk menyewa apartemen atau biaya transportasi di kota seperti Tokyo.

Di Jepang, tingkat pengangguran melonjak tajam pada tahun 1990an, bukan hanya di kalangan paruh baya dan pekerja yang lebih tua, namun juga melanda kaum muda Jepang. Mereka dikenal dengan sebutan “freeters”, yakni golongan yang tidak bekerja secara full time dalam sebuah perusahaan, namun mereka adalah orang-orang yang bekerja paruh waktu atau pekerja kontrak. Kaum muda yang masuk golongan freeters lebih nyaman hidup menumpang di rumah orang tua mereka, dimana mereka ini lebih dikenal dengan sebutan *parasite single*. *Parasite single* yang melanda sebagian besar orang muda Jepang menjadi simbol betapa lemahnya kemandirian mereka karena hidup bergantung pada orang tua.

Apa yang terjadi di balik perubahan perilaku kaum muda Jepang, bukan hanya perubahan dalam etos kerja atau peningkatan ketergantungan. Sebaliknya, ini adalah produk sampingan dari kebingungan sistem ketenagakerjaan Jepang, yang tidak dapat menangani usia baru secara memadai. Meskipun di permukaan sistem berbasis kenerja baru telah diperkenalkan, pada kenyataannya hampir tidak ada perubahan dalam aktifitas pekerjaan yang sebenarnya. Perusahaan Jepang masih kurang fleksibel untuk menyesuaikan pekerjaan dalam memberikan peluang bagi kaum muda. Sebaliknya tuntutan yang berlebihan untuk menuju perubahan telah menghilangkan kesempatan bagi kaum muda untuk melakukan pelatihan, yang pada gilirannya telah melahirkan orang-orang muda yang berpindah dari satu pekerjaan paruh waktu atau kontrak ke perusahaan lain. Namun, tidak sedikit orang yang sadar akan rasa ketidakamanan kerja yang lebih serius. Mereka merasa tidak aman karena

tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketidakamanan pekerjaan semacam ini menimbulkan perasaan cemas, sehingga telah menimbulkan kesenjangan perekonomian antara yang kaya dan yang miskin. Banyak media massa yang menyoroti apa yang telah terjadi di Jepang.

Pada bulan Mei tahun 2000, dua majalah terkemuka di Jepang Bungei Shunjuu dan Chuo Koron secara simultan menerbitkan isu khusus antara kaya dan miskin. Studi terbaru seperti Nihon no Keizai Kakusa (Japan's Economic Disparities) oleh ahli ekonomi Tachibanaki Toshiaki (Tokyo:Iwanami Shinsho,1998) dan Fubyoudou Shakai Nihon (Japan, the Inequitable Society) oleh ahli sosiolog Satou Toshiki (Tokyo: Chukou Shinsho,2000) semakin memperjelas perbedaan pendapatan dalam masyarakat Jepang.

Angka pengangguran mencapai puncak tertinggi pada tahun 1990 an, bukan hanya terjadi pada usia 30-40 tahun, tapi juga melanda kaum muda Jepang. Pada akhirnya banyak kaum muda Jepang yang memilih menjadi “freeters”, yakni mereka yang tidak bekerja secara full time, namun selalu beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain, atau dari satu kontrak pekerjaan ke kontrak pekerjaan lain. Meningkatnya dua jenis kelompok pekerja ini turut membawa perubahan pada perilaku kaum muda Jepang dan kelompok pekerja lain. Banyak kaum muda yang tetap bertahan hidup bersama orang tuanya atau tinggal di cafe-cafe internet, kelompok ini yang disebut dengan *parasite single* dan *cyber homeless*.

Di perusahaan-perusahaan besar dengan lebih dari 1000 karyawan , rasio karyawan tetap yang berumur 45 tahun ke atas meningkat dari 31% pada tahun 1991 menjadi 37% pada tahun 2000. Pada tahun 1979 setelah krisis miyak ke-2 , angka tersebut hanya 22%. Perbandingan ini memberikan kita gambaran yang baik tentang seberapa tajam persentase pekerja paruh baya dan yang lebih tua meningkat dalam jangka menengah sampai panjang (Yuji, 2005:34).

Tidak diragukan lagi, ketidakpastian dalam tenaga kerja menjadi penyebab ketidakstabilan dalam banyaknya jumlah angkatan kerja usia paruh baya dan yang lebih tua. Satu cerminan dari surplus tenaga kerja yang terus bertambah adalah kenyataan bahwa struktur upah lulusan perguruan tinggi untuk usia paruh baya dan yang lebih tua di perusahaan-perusahaan besar menunjukkan tanda-tanda perubahan. Gaji mereka secara perlahan menurun bila dibandingkan dengan *fresh graduate* dan lulusan dari sekolah menengah atas. Selain itu, untuk lulusan perguruan tinggi usia paruh baya dan yang lebih tua juga mengalami perbedaan upah yang cukup lebar. Kondisi surplus tenaga kerja, baik yang berusia paruh baya dan yang lebih tua serta pengurangan drastis dalam perekrutan lulusan baru menjadi masalah dalam perusahaan Jepang saat itu. Sementara itu, banyak perusahaan

yang terus membiarkan pekerja paruh baya dan usia lebih tua untuk tetap memegang pekerjaan yang sudah mereka miliki, tanpa memberikan kesempatan bagi pekerja muda untuk memasuki perusahaan.

Permasalahan yang terjadi adalah banyak perusahaan besar yang mempekerjakan karyawan tetap usia di atas 40 tahun ke atas dengan persentase yang cukup besar, sehingga ‘mencuri’ pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pekerja muda yang tepat. Kenyataannya, perusahaan besar dengan prosentase tinggi karyawan penuh waktu yang berusia 45 tahun ke atas sangat mungkin mengurangi dengan tajam jumlah lowongan pekerjaan untuk lulusan baru. Mereka memiliki proporsi yang tinggi sebagai karyawan senior, dan menjadi 3 faktor struktural yang harus dihadapi oleh perusahaan besar. Pertama, perusahaan mempekerjakan sejumlah besar orang muda selama periode pertumbuhan yang cepat. Pekerja besar pada awal tahun 1970 memasuki usia 40 an dan 50 an pada akhir 1990 an. Para pekerja yang menua ini adalah faktor di balik biaya personal yang terus meningkat di perusahaan yang tidak dapat mengubah sistem upah berdasarkan senioritas mereka. Kedua, banyak perusahaan dengan tenaga kerja yang mulai ‘beruban’ kembali bekerja pada kaum muda sejak krisis minyak. Karena inilah perusahaan terus mengurangi perekrutan tenaga kerja sejak tahun 1970 an. Karyawan di bawah usia 45 tahun membentuk komponen yang lebih kecil dari tenaga kerja an sebagai hasilnya proporsi mereka yang berusia di atas 45 tahun terus meningkat. Pengurangan jumlah tenaga kerja bukan hanya hasil dari resesi pada tahun 1990 an, namun hal ini telah berlangsung untuk jangka waktu yang lebih lama. Ketiga, perusahaan-perusahaan ini merasa semakin sulit untuk memindahkan karyawan paruh baya yang lebih tua ke perusahaan lain. Jika transfer antara perusahaan induk dan afiliasinya (shukka) dapat dilakukan dalam skala besar, maka perusahaan dapat membudidayakan surplus pekerja yang lebih tua, sehingga mengurangi proporsi pekerja berusia 40 tahun. Karena perusahaan tidak dapat lagi melakukannya, maka jumlah mereka terus meningkat.

2.3 Fenomena *Cyber Homeless* di Jepang

Cyber homeless adalah sebuah fenomena yang kini menjamur di perkotaan besar di Negeri Matahari Terbit. Meski hingga kini Jepang dikenal sebagai salah satu negara maju dengan pendapatan per kapita warganya yang termasuk tertinggi di dunia, namun kemunculan *cyber homeless* menjadi realita tersendiri dalam perubahan sosial masyarakat Jepang.

Bila kita melihat fenomena *cyber homeless* di Jepang, maka di kota-kota besar seperti Tokyo banyak terlihat cafe internet dan *manga* yang biasa buka 24 jam dan menawarkan

fasilitas unlimited internet, *manga* dan privasi dengan harga murah. Beberapa cafe *manga* bahkan menawarkan minuman ringan gratis, akses mesin penjual otomatis dan shower di tempat. Cafe ini juga menarik bagi tunawisma dan orang-orang yang setengah menganggur.

Sebuah survey telah dilakukan oleh Tokyo Metropolitan Government pada November 2016 – Januari 2017 terhadap 504 kafe internet dan *manga* yang buka 24 jam dengan 946 pelanggan. Hasil survey resmi yang dihasilkan dari 222 kafe memperkirakan sebanyak 1500 orang telah tinggal di kafe ini selama seminggu dan 4000 orang diantaranya tidak memiliki tempat tinggal serta 3000 orang tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Survei tersebut juga menyatakan bahwa 37,1 % menggunakan kafe internet sebagai pengganti hotel untuk urusan bisnis atau perjalanan pribadi. Di sisi lain sebanyak 25,8% menegaskan bahwa mereka tidak memiliki tempat tinggal yang stabil dan menjadikan kafe internet sebagai pilihan rumah mereka.

Survei tersebut juga menemukan bahwa, dari 363 orang yang memastikan bahwa mereka adalah pekerja sementara dan tidak memiliki tempat tinggal yang stabil, lebih dari 90 persen menggunakan sejumlah pilihan tempat berlindung yang berbeda, termasuk restoran cepat saji, atau hanya tidur di jalanan. Survei tersebut mendefinisikan pekerja sementara sebagai pekerja tanpa pekerjaan yang stabil. Ini termasuk karyawan kontrak dan paruh waktu. Meskipun periode tunawisma bervariasi, 17,6 persen mengatakan bahwa mereka telah pindah dari tempat tinggal mereka sebelumnya satu sampai tiga bulan sebelumnya dan 11,0 persen mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tempat tinggal selama lebih dari 10 tahun. Hampir 1/3 dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal stabil mengatakan alasan utama mereka kehilangan rumah mereka adalah ketidakmampuan membayar uang sewa karena kehilangan pekerjaan. Responden juga mengklaim bahwa kendala terbesar untuk menyewa kamar adalah biaya awal yang tinggi, serta kurangnya pendapatan yang stabil untuk membayar sewa dalam jangka panjang. Menurut usia, sebagian besar pengunjung kafe internet tampaknya adalah orang dewasa yang lebih tua, dengan 38,6 persen berusia 30-an dan 28,9 persen di usia 50-an. Hiroyo Watabe, juru bicara pemerintah metropolitan, menjelaskan bahwa tingginya rasio orang berusia 30-an mungkin mencerminkan akibat dari krisis keuangan global tahun 2008, sementara sebagian besar orang berusia 50-an mungkin hanya mencerminkan bahwa orang-orang di demografis tersebut memiliki waktu yang lebih sulit untuk menemukan pekerjaan. (<https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/29/national/social-issues/internet-cafe-refugees-3000-tokyo-survey-says/#.WncMmtDm3IU>).

Ren Ohnishi, ketua Pusat Dukungan Independen Moyai, sebuah organisasi nirlaba yang bemarkas di Tokyo, menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak memiliki tempat

tinggal atau penghasilan stabil cenderung jatuh di antara celah-celah dukungan pemerintah. "Mereka tidak mendapatkan cukup uang untuk mendapatkan tempat tinggal, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kesejahteraan karena mereka memiliki penghasilan," katanya, menambahkan bahwa dia akan menganggap ada lebih dari 4.000 orang tanpa pendapatan atau perumahan yang stabil. di kota. Dia mengatakan bahwa "lebih banyak yang harus dilakukan pada tingkat kebijakan yang lebih tinggi untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan orang-orang ini." Watabe mengatakan bahwa survei tersebut hanyalah awal dari upaya untuk memahami apa "status quo" tersebut. "Kami akan menganalisis hasilnya dan menggunakan ini untuk kebijakan masa depan untuk memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan mendapat dukungan yang mereka butuhkan," katanya. Survei utama terakhir pada pengungsi warnet dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan pada tahun 2007 dan memperkirakan bahwa sekitar 5.400 orang secara nasional tidak memiliki tempat tinggal yang stabil.

Gambaran kenyataan tersebut merupakan salah satu sisi gelap dari negara Jepang, dimana biaya hidup yang tinggi menjadi penyebab banyaknya orang Jepang yang tak mampu menyewa tempat tinggal, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa memilih untuk tinggal dan hidup di internet cafe (Net Cafe). Mereka yang tinggal di Warnet biasa dikenal dengan Net café refugees atau dikenal juga dengan *cyber-homeless*. Bahkan berdasarkan data dari survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan Jepang pada tahun 2007, sejumlah 60.900 orang pernah tinggal di warnet.

Sebuah perkiraan lain menyebutkan bahwa 5.400 orang terpaksa tinggal di warnet karena tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hal tersebut masih berlanjut hingga saat ini. Menurut Makoto Kawazoe selaku bagian dari serikat pekerja muda di Jepang mengatakan bahwa fenomena penghuni warnet ini sudah terjadi di akhir 1990-an. Sebagian besar *cyber homeless* ini adalah mereka yang masih bekerja sebagai pegawai paruh waktu. Kondisi keuangan mereka dapat dikatakan sangat tidak mencukupi, sehingga membuat mereka terpaksa memilih untuk tinggal di Net Cafe.

Cafe internet di Jepang menyediakan bilik yang dilengkapi *futon* sebagai tempat tidur untuk orang yang ingin mengambil "Night Pack" dengan harga sewa berkisar antara 1.500 hingga 2.500 yen atau setara dengan Rp 196.000 – Rp 294.000 untuk durasi 8 sampai 10 jam. Selain itu, pengelola kafe ini juga menyediakan toilet untuk mandi dengan durasi 15 menit. Sebagai informasi tambahan bahwa biaya sewa apartemen di Tokyo yang termurah itu sekitar 80.000 Yen atau sekitar Rp 10 juta per bulan.

Maka para pekerja level bawah atau paruh waktu yang berpenghasilan sekitar 100,000-150,000 yen perbulan tentu saja harga tersebut mencekik mereka. Sedangkan jika menginap di cafe internet, untuk satu bulan cukup mengeluarkan uang sekitar 45,000 yen atau sekitar 6 juta rupiah saja. Dengan perhitungan seperti ini, maka sisa gaji mereka masih dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Fasilitas minuman gratis juga disediakan oleh cafe internet di Jepang, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan dipilihnya tempat ini sebagai lokasi tempat tinggal sementara, hingga mereka mampu membayar lebih.

Tidur di cafe internet tidak nyaman seperti di rumah atau pun apartemen, namun hal ini akan memangkas biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Bahkan layanan laundry pun juga tersedia, selain itu para *cyber homeless* juga bisa menggunakan internet dan membaca manga sepuasnya. Masalah *cyber homeless* telah menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintahan Jepang, namun hingga kini pemerintah Jepang masih terus mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi dengan terus meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari, hal ini tentu bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya *bubble economy* yang diikuti oleh meletuskan gelembung ekonomi telah berdampak pada munculnya beberapa permasalahan sosial pada masyarakat Jepang. Fenomena *freeters*, *parasite single* maupun *cyber homeless* merupakan masalah sosial yang turut menyertai dinamika lajunya perekonomian Jepang.

Ketidakstabilan perekonomian Jepang juga berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat Jepang. Ketika terjadi gelembung ekonomi banyak kaum muda Jepang yang dimanjakan oleh kondisi ekonomi yang stabil, dimana pada masa ini banyak bermunculan *parasite single*, yakni sekelompok kaum muda yang mapan secara ekonomi namun menggantungkan hidup kesehariannya kepada orang tua mereka.

Ketika Jepang berada pada masa stagnasi perekonomian, sebagai dampak dari krisis minyak, pecahnya gelembung ekonomi dan sistem ketenagakerjaan yang masih berdasarkan senioritas, maka masalah *freeters*, *cyber homeless* mulai bermunculan. Kelompok *cyber homeless dan freeters* adalah orang-orang yang terpinggirkan karena sistem pengelolaan manajemen perusahaan yang terpaksa memberlakukan sistem yang berbeda, sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tidak stabil.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Elena Kilina.(2012). *Cubicle Shelter: New Space for The Tokyo Homeless*. Lund University: Centre for East and South Asian Studies
- Francks Penelope.(2015). *Japanese Economic Development, Theory and Practice*. London: Routledge Taylor&Francis Group
- Iyoda M.(2010). *Postwar Japanese Economy*. Springer Science of Business Media.
- International Monetary Fund, The Japanese Banking Crisis of the 1990s: Sources and Lessons, IMF Working Paper WP/00/7 January 2000.
- Suryana, Prof. Dr, M.Si. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Statistic Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, *Statistical Handbook of Japan*, 2016.
- Tiara Koji.(1983). *Japan's Law Unemployment: Economic Miracle or Statistical Artifact*. Blue Pencil Publication Contest of The National Association of Government Communicators.
- Uchino Tatsuro.(1983). *Japan's Postwar Economy:A Insider's View of Its History and Its Future*. Japan: Kodansha International Ltd
- Yoshihara Kunio. (1992). *Pembangunan Ekonomi Jepang, Sebuah Pengantar (Edisi Kedua)*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Yuji Genda.(2005). *A Nagging Sense of Job Insecurity:The New Reality Facing Japanese Youth*. Japan: International House of Japan, Inc
- <http://www.thebubblebubble.com/japan-bubble/>. Diunggah pada 7 April 2018
- When Home is An Internet Cafe. <https://psmag.com/magazine/japans-internet-cafe-refugees>
Diunggah pada 10 Maret 2018
- Shimonji.(2018).The Rise of Japan's "Cyber-Homeless" Population
<http://goboiano.com/the-rise-of-japans-cyber-homeless-population/>. Diunggah pada 10 Maret 2018
- Sakura Murakami.Tokyo's internet cafe 'refugees' number 4,000, survey says.
<https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/29/national/social-issues/internet-cafe-refugees-3000-tokyo-survey-says/#.WncMmtDm3IU> . Diunggah pada 10 Maret 2018
- <https://www.divertone.com/fenomena-net-cafe-refugees-di-jepang/>
[Japan Bubble Economy of The 1880'S http://www.thebubblebubble.com/japan-bubble/](http://www.thebubblebubble.com/japan-bubble/)
<https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/29/national/social-issues/internet-cafe-refugees-3000-tokyo-survey-says/#.WncMmtDm3IU>.